

FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN

**Bainil Yulina¹⁾, Kartika Rachma Sari.²⁾, Rita Martini³⁾,
Husnul Hidayati Sari Dewi⁴⁾ Khairunnisa Ayu Safitri⁵⁾.**

Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
Email: byulina@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine whether the DBH, DAU, DAK and PAD significantly influence the local government expenditures both partially and simultaneously and also to know whether there has been a flypaper effect on the districts / cities in South Sumatera in 2012 to 2016. The object of this research focuses on 15 districts / cities in South Sumatera province. The analytical method used in this study is multiple regression with the data panel. The results of this study stated that partially DBH, DAU, DAK and PAD have positive and significant influence to regional expenditure in South Sumatera in the year 2007-2012. Simultaneously DBH, DAU, DAK and PAD also significantly affect regional expenditure because the value F statistic is greater than the value of F table = 5% in the amount of 442,2431 > 3,48. In the study also obtained results that occur flypaper where the largest revenue source of DAU which affect the amount of spending in the next year.

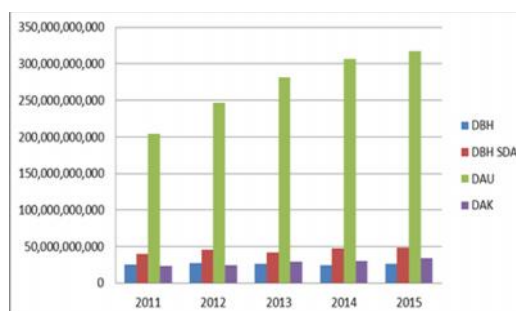
Keywords : DBH, DAU, DAK, PAD, Local Government Expenditure and Flypaper Effect

1. PENDAHULUAN

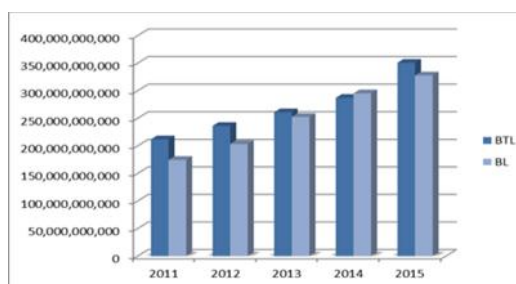
Tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi lebih besar dalam mengelola daerahnya masing-masing melahirkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Daerah menghendaki diberikan keleluasaan dalam mengatur daerahnya masing-masing termasuk adanya pemerataan dana pembangunan. Hal ini yang telah membawa pemberlakuan kebijakan baru pemerintah tentang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan sumber pendanaan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi lebih lancar dengan tidak mengabaikan distribusi pendapatan antar wilayah yang timpang seperti terjadi pada masa lalu (Carson, dalam Badrudin 2012:7).

Seharusnya transfer dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan menjadi insentif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber penerimaan utama untuk membiayai operasi utama sehari-hari dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Data yang didapatkan peneliti bahwa realisasi penerimaan dan belanja pemerintah kab/kota seluruh Indonesia periode 2011-2015 terus meningkat seperti digambarkan diagram berikut ini.

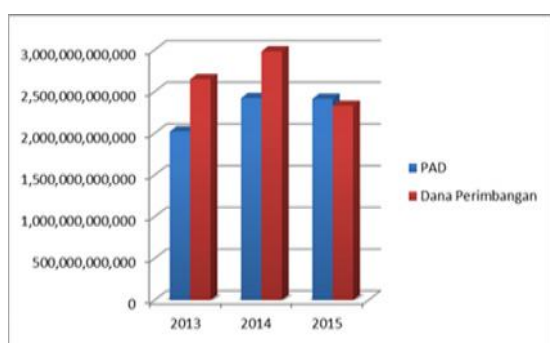


Sumber : Diolah peneliti, 2017



Sumber : Diolah peneliti, 2017

Halim dalam Maemunah (2006) menyatakan bahwa Pemda kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan Pemda kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian kota/kabupaten di Sumatera Selatan digerakkan oleh sektor tersier dan sekunder secara dominan yaitu sektor perdagangan/ hotel/ restoran, telekomunikasi dan transportasi, dan industri pertambangan yang dapat meningkatkan PAD. Berikut menunjukkan gambaran besaran dana perimbangan dan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan selama 3 periode terakhir.



Sumber : Diolah peneliti, 2017

Fenomena utama dalam penelitian ini adalah *flypaper effect*, yaitu perbedaan dalam pola pengeluaran yang tergantung dari sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari usaha sendiri (PAD) dengan pendapatan yang diberikan pihak lain seperti transfer (Dana Perimbangan). Atau dengan arti lain *flypaper effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja dengan lebih banyak menggunakan dana perimbangan daripada pendapatan asli daerah. Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut dialokasikan kedalam belanja (Badrudin, 2012:7).

Dengan karakteristik data Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah yang berfluktuasi seperti diatas maka kemungkinan besar terjadi *Flypaper Effect* pada belanja daerah di kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itulah maka peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah pada belanja daerah di Sumatera Selatan.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap Belanja daerah?

2. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan terhadap Belanja daerah?
3. Apakah terjadi *flypaper effect* dalam periode 2012-2016 di Sumatera Selatan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap Belanja daerah,
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan terhadap Belanja daerah, serta
3. Untuk mengetahui terjadinya *flypaper effect* dalam periode 2012-2016 di Sumatera Selatan.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Fenomena *Flypaper Effect*

Menurut Badrudin (2012:7), *Flypaper effect* adalah adanya perbedaan dalam pola pengeluaran yang tergantung sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari usaha sendiri (PAD) dengan pendapatan yang diberikan pihak lain seperti transfer (Dana Perimbangan).

Menurut Aprilla dan Redo (2013:17), *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran pemerintah daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah dana transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan sendiri. Beberapa studi menunjukkan perbedaan dana transfer dengan dana sendiri memang terjadi.

Berdasarkan teori Peacock dan Wiseman dalam Purbayu dan Retno (2005) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman tersebut menjelaskan bahwa secara ideal hal tersebut menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya Pendapatan Domestik Bruto setiap masyarakat menyebabkan Pendapatan Asli Daerah semakin besar sehingga secara sepadan akan menyebabkan pengeluaran Pemerintah Daerah menjadi semakin besar pula. Hal tersebut ternyata

tidak selalu ideal dan seolah menyimpang dari konteks rill.

Dana Bagi Hasil

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana bagi hasil didefinisikan sebagai Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber penerimaan pusat di daerahnya meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPH Perseorangan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 Ayat 2 dinyatakan bahwa jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak; dan bagi hasil bukan pajak.

Dana Alokasi Umum

Menurut Halim (2016:127) mengatakan “dana alokasi umum adalah transfer transfer dana yang bersifat *“block grant”*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah”. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, paling kurang dua puluh enam persen (26%) dari penerimaan bersih dalam negeri pemerintah dialokasikan untuk DAU.

Dana Alokasi Khusus

Menurut Mahmudi (2016:139), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah, oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD (Listiorini, 2012).

Pendapatan Asli Daerah

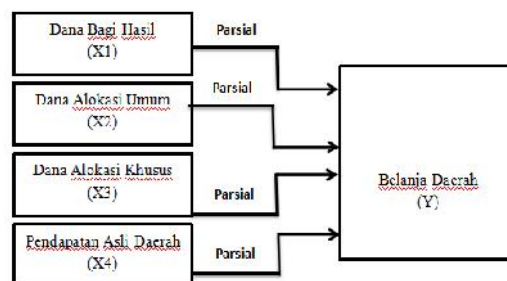
Menurut Widarnarto (2015:19), Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang di peroleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut dengan menerbitkan peraturan daerah dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Belanja Daerah

Menurut Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, “Belanja Daerah merupakan kewajiban

pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka berpikir

Hipotesis

Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah.

Maimunah (2006) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah, dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : Diduga terdapat pengaruh dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah.

Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

Jika Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah maka kemungkinan besar Dana Alokasi Umum ikut berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat nilai pemerintah daerah tersebut, disebabkan peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan, karena Belanja Daerah lebih di dominasi dari jumlah Dana Alokasi Umum. Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₂ : Diduga terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah.

Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah.

Dana Alokasi Khusus menunjukkan apabila Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah maka dana alokasi khusus kemungkinan ikut berpengaruh terhadap belanja daerah, hal ini disebabkan karena nilai Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah. Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₃ : Diduga terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Menurut Iskandar (2012) menyatakan bahwa tingkat pendapatan akan berpengaruh positif pada belanja publik. Bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan belanja daerah. Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₄ : Diduga terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

Hubungan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Keempat variabel independen dalam penelitian ini memiliki hubungan yang langsung dengan variabel dependennya yaitu belanja daerah. Menurut Listiorini (2012) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₅ : Diduga terdapat pengaruh secara simultan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 17 kabupaten dan kota. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling*. Kriteria pemerintah daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2012-2016 dan ketersediaan data di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pusat.
2. Daerah kabupaten dan kota yang bukan merupakan daerah pemekaran pada kurun waktu 2012-2016.

Berdasarkan kriteria di atas, dari 17 pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan diperoleh 15 pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai sampel dalam penelitian ini kecuali Kabupaten Pali dan Muratara.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi nonpartisipan.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian adalah Belanja Daerah, yaitu semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Variabel independen (X1) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Variabel independen (X2) Dana Alokasi Umum adalah Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Variabel independen (X3) Dana Alokasi Khusus adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional.

Variabel independen (X4) Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan model ekonometrika dengan bantuan program Eviews 9. Adapun model penelitian dijabarkan sebagai berikut.

$$BDit = + 1DBHit + 2DAUit + 3DAKit + 4PADit + eit$$

Dimana:

BDit	: Belanja Daerah
DBHit	: Dana Bagi Hasil
DAUit	: Dana Alokasi Umum
	: Dana Alokasi Khusus
PADit	: Pendapatan Asli Daerah
	: Konstanta
1, 2, 3, 4	: Koefisien Regresi
ei	: error

Pada pemilihan model estimasi data panel dapat dilakukan dengan Metode Efek Tetap (*Fixed Effect*) atau Metode Efek Acak (*Random Effect*), sedangkan untuk melakukan metode mana yang lebih sesuai dalam penelitian ini digunakan uji Chow dan Uji Hausman (Hausman test).

Untuk mendeteksi apakah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah digunakan kriteria sebagai berikut: Jika Nilai koefisien regresi PAD \geq DAU, maka tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah kab/kota di Sumatera Selatan. Sebaliknya Jika Nilai koefisien regresi PAD $<$ DAU, maka terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah kab/kota di Sumatera Selatan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai *probability Cross-section F* hitung sebesar 0.0380, ini berarti probabilitas cross-section $F < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dipilih adalah model *fixed effect method* (FEM). Langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman. Hasil uji Uji Hausman menunjukkan bahwa nilai *probability Cross-section random* hitung sebesar 0.0041, ini berarti probabilitas cross-section random $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dipilih adalah model *fixed effect method* (FEM).

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengambilan keputusannya ialah apabila nilai Jarque-Bera (J-B test) tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data berdistribusi normal, atau bila probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal (Winarno, 2015:5.43). Berdasarkan tabel hasil uji normalitas terlihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 4,539263 dan nilai probability sebesar 0,103350 lebih besar dari 0,05 yang berarti data terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan diantara variabel bebas. Deteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan regresi suatu variabel bebas terhadap variabel bebas lain dalam model. Hasil analisis uji multikolinieritas terlihat bahwa R-square sebesar 0.931306 lebih kecil dari R-square statistik model utama 0.990236 yang berarti tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian *white heterokedasticity* test untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heterokedastisitas dalam model. Berdasarkan hasil uji White diperoleh nilai obs chi-square statistik sebesar 21.64098 sedangkan nilai chi-square tabel pada $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 11 adalah 26.757. Karena nilai obs chi-square statistik lebih kecil dari nilai chi-square tabel maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas dalam model.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi residual satu observasi dengan observasi lainnya. Pengujian autokorelasi dilakukan salah satunya dengan breusch-godfrey serial correlation LM test. Berdasarkan hasil uji breusch-godfrey memperoleh nilai obs chi-square statistik sebesar 3.702491 sedangkan nilai chi-square tabel pada $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 11 adalah 26.757. Karena nilai obs chi-square statistik lebih kecil dari nilai chi-square tabel maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model.

Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik dan layak untuk dilakukan uji statistik selanjutnya. Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai F statistik sebesar 315.5189 lebih besar dari nilai F tabel pada $\alpha = 5\%$ atau 0,05 sebesar 3,48 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya bahwa secara bersama-sama variabel DBH, DAU, DAK, dan PAD memiliki pengaruh terhadap belanja daerah pada periode 2012-2016.

1. Hasil uji hipotesis variabel Dana Bagi Hasil (DBH)

Hasil regresi diperoleh nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar **7.011829**. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ sebesar 2,228. Oleh karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 dan karena probabilitas $0,000 < 0,05$, ini berarti DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel BD periode tahun anggaran 2012-2016.

2. Hasil uji hipotesis variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Hasil regresi diperoleh nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar **12.00624**. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ sebesar 2,228. Oleh karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 dan karena probabilitas $0,000 < 0,05$, ini berarti DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel BD periode tahun anggaran 2012-2016.

3. Hasil uji hipotesis variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hasil regresi diperoleh nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar **6.585828**. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ sebesar 2,228. Oleh karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 dan karena probabilitas $0,000 < 0,05$, ini berarti DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel BD periode tahun anggaran 2012-2016.

4. Hasil uji hipotesis variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil regresi diperoleh nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar **4.521018**. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t_{tabel}

pada tingkat signifikansi = 5 % sebesar 2,228. Oleh karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 dan karena probabilitas $0,000 < 0,05$, ini berarti PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel BD periode tahun anggaran 2012-2016.

Berdasarkan tabel maka menghasilkan persamaan sebagai berikut.

$$BD : -274990.6 + 0.887*DBH + 1.928*DAU + 0.954*DAK + 1.056*PAD + e$$

Persamaan tersebut dapat diartikan:

1. Nilai konstanta sebesar sebesar -274990.6 artinya bahwa Belanja Daerah rata-rata Kabupaten/Kota akan menurun sebesar -274990.6 dengan asumsi bahwa nilai Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan atau dianggap konstan. Hasil estimasi diatas menyimpulkan bahwa pada kondisi DBH, DAU, DAK, dan PAD nol, Kab/Kota yang Belanja Daerahnya rendah mengindikasikan bahwa daerah tersebut tidak memiliki cadangan keuangan yang cukup untuk membiayai belanja daerahnya, apakah dalam bentuk sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SILPA) maupun bentuk lainnya.
2. Variabel DBH dengan nilai koefisien 0.887 artinya jika variabel DBH meningkat sebesar satu persen sedangkan nilai variabel lain tetap (*Ceteris Paribus*) maka akan mengakibatkan naiknya nilai belanja daerah sebesar 0.887.
3. Variabel DAK dengan nilai koefisien 0.954 artinya jika variabel DBH meningkat sebesar satu persen sedangkan nilai variabel lain tetap (*Ceteris Paribus*) maka akan mengakibatkan naiknya nilai belanja daerah sebesar 0.954.
4. Variabel PAD dengan nilai koefisien 1.056 artinya jika variabel PAD meningkat sebesar satu persen sedangkan nilai variabel lain tetap (*Ceteris paribus*) maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Daerah sebesar 1.056.

Analisis Flypaper Effect

Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus (respons) terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer DAU dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Listiorini, 2011). Nilai yang didapat dari tabel 4.7 menunjukkan koefisien regresi antara koefisien DAU sebesar 1.928951 dan nilai koefisien PAD sebesar 1.056411 dan keduanya signifikan. Hal tersebut berarti telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, karena seperti telah dijabarkan syarat terjadinya *flypaper effect* yaitu koefisien DAU lebih besar daripada PAD dan kedua-duanya signifikan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada belanja

daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan terbukti. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Maimunah (2006), Listiorini (2012), dan Wiwin Sawali et al (2014).

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah

DBH merupakan dana perimbangan pemerintah pusat yang memiliki persentase paling besar diantara jumlah dana perimbangan lainnya yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam APBN (Solihin, 2014). Hasil regresi menunjukkan pengaruh DBH terhadap belanja daerah di Kabupaten/kota di Sumatera Selatan adalah positif dan signifikan artinya jika variabel DBH meningkat maka akan meningkat pula belanja daerah. Koefisien DBH bernilai positif juga menunjukkan jika dana bagi hasil mengalami peningkatan maka akan menaikkan jumlah belanja daerah. Hasil penelitian ini relevan dengan yang dilakukan oleh Hadi Sasana (2010) yang menyebutkan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005). Dalam penelitian ini menemukan bahwa DAU di lima belas Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan memiliki pengaruh signifikan dan positif membiayai belanja daerah. Hal ini dikarenakan tingkat DAU yang berfluktuasi setiap tahunnya turut mempengaruhi dalam pengalokasian belanja terutama belanja daerah. Penelitian ini relevan dengan yang dilakukan Fitri (2015), Wiwin (2014), Afrizawati (2011), Listiorini (2011), dan Maimunah (2006) yang menyebutkan proporsi Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh koefisien regresi DAK menunjukkan hasil sebesar 0.954382 menunjukkan jika variabel DAK meningkat sebesar 1% maka belanja daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan akan meningkat sebesar 0,954 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain adalah konstan. Variabel DAK (X3) dengan arah positif ($6.585828 > 2,228$) menunjukkan bahwa variabel DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian Listiorini (2011) di Sumatera Utara yang menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara. Hal ini dapat terjadi karena DAK yang merupakan dana yang dialokasikan kepada

daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sehingga menyebabkan setiap daerah tentu memiliki perbedaan dalam tingkat besaran penerimaan dana alokasi khusus ini.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menemukan bahwa PAD di lima belas Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Koefisien regresi PAD sebesar 1.056411 menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah adalah artinya jika variabel PAD meningkat sebesar 1% maka belanja daerah akan meningkat sebesar 1,05 dengan asumsi bahwa variabel lain adalah konstan. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Armawadi (2015), Wiwin (2014), Afrizawati (2012), Listiorini (2011), dan Maimunah (2006) yang menyebutkan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan pengujian secara simultan diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 315.5189 dengan nilai signifikansi 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa DBH, DAU, DAK, dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menentukan terjadinya fenomena *flypaper effect* pada penelitian ini dengan membandingkan besaran nilai koefisien DAU dan PAD ($1.928951 > 1.056411$) yang berarti telah terjadi *flypaper effect* karena seperti telah dijabarkan syarat terjadinya *flypaper effect* yaitu koefisien DAU lebih besar daripada PAD dan kedua-duanya signifikan. Penelitian ini juga mendukung berbagai penelitian yang menemukan fenomena *flypaper effect* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Armawadin (2015), Wiwin (2014), Listiorini (2011), dan Maimunah (2006) yang membuktikan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Periode 2012-2016.
2. Secara simultan variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Periode 2012-2016. 3) Pengujian secara simultan membuktikan bahwa terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Periode 2012-2016.

Saran

1. Bagi beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan melalui hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadinya *flypaper effect* dimanapembiayaan masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat khususnya DAU. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut disarankan agar pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pungutan daerah baik pajak maupun retribusi daerah.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat lebih memperbanyak sampel Kabupaten/Kota diluar provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat dijadikan perbandingan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilla, Nila dan Redo Arian Saputra. 2013. Pengaruh *Flypaper Effect*, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. 3, (2), 107-131.
- Afrizawati. 2012. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi, Volume 2, Nomor 1*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Amalia, Fitri. 2015. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten. *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 11, Nomor 1*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amalia, Fitri. 2015. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten. *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 11, Nomor 1*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Armawaddin, Muhammad. 2015. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume XVI*. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Bahar, Ujang. 2009. *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Indeks.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Fitri, Diana. 2014. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap *Flypaper Effect* (Studi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera 2008-2012). *Skripsi*. Universitas Padang.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

- Iskandar, Irham. 2012. *Flypaper Effect* pada *Unconditional Grant*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 13, Nomor 1*. Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung.
- Listiorini. 2012. Fenomena Fly Paper Effect Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Santoso, Imam. 2015. Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung. *JEP-Vol. 4, NO 2, Juli 2015X*. Lampung.
- Sanusi, Anwar. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat
- Sasana, Hadi. 2010. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Simanjuntak, Robert, 2001. *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: A One Day Conference*. LPEM-UI. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wiwini Anggriani Salawali, et all. 2014. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Winarno, Wing Wahyu. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN